

**-KAJIAN TINGKAT PARTISIPASI (PENGUNAAN HAK PILIH)  
MAHASISWA STKIP PGRI NGANJUK DALAM MELAKSANAKAN  
PEMILIHAN UMUM (PILEG DAN PILPRES TAHUN 2014) SEBAGAI  
BAHAN REKOMENDASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NGANJUK**

**Yudha Harnanto<sup>1</sup>, Hendro Warsito<sup>2</sup>**

STKIP PGRI Nganjuk

[harnantoyudha@gmail.com](mailto:harnantoyudha@gmail.com)

**Abstrak :** Penelitian ini akan mengkaji fakta fakta dan masalah-masalah yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden serta pemilihan umum anggota legeslatif tahun 2014 untuk mengukuir tingkat pendidikan politik masyarakat maupun kesadaran politik masyarakat dengan parameter tingkat partisipasi (penggunaan hak pilih) mahasiswa sebagai masyarakat kampus sebagai golongan pemilih pemula dan golongan intelektual. Aspek penting yang menjadi dasar penelitian ini adalah adanya korelasi obyek penelitian dengan beberapa mata kuliah yang ada di program studi PPKn sehingga hasil penelitian ini bias menjadi referensi buku ajar untuk matakuliah di prodi PPKn. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan dapat diketemukan deskripsi yang luas dan mendalam mengenai perilaku, sikap mental, perasaan, keyakinan yang dianut oleh seseorang atau kelompok dalam lingkungannya. Sampeldan sumber data dipilih dengan mengutamakan perspektifemic, artinya mementingkan pandangan informan/responden, yakni bagaimana mereka memandang sesuatu dari pendiriannya. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles and Huberman dan Spradley. Uji keabsahan data atau uji kredibilitas(validitas internal) data dalam penelitian ini dilakukan melalui sejumlah pendekatan yaitu: (1) Dengan perpanjangan pengamatan, (2). Meningkatkan ketekunan, (3). Triangulasi, (4). Diskusi dengan teman sejawat, (5). Member check, dan (6). Analisa kasus negatif. Hasil penelitian pada (1) Tingkat Kehadiran dan Ketidakhadiran mahasiswa di TPS (Voter Turn-Out) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden/Pilpres dan Pemilihan Legislatif/Pileg) Tahun 2014 pada mahasiswa di STKIP PGRI Nganjuk menunjukkan data 96% responden hadir, dan hanya 4% responden tidak hadir, (2) Faktor yang mempengaruhi tingkat kehadiran yaitu faktor

popularitas calon/kandidat, faktor sosial politik, dan faktor sosial ekonomi.

**Kata Kunci: Partisipasi Pemilih, Pilleg, Pilpres**

## **Pendahuluan**

Demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan Kepala Daerah langsung yang telah berlangsung sejak 2004. Dalam berbagai kontestasi politik, termasuk momentum Pilpres, Pileg maupun pilkada idealnya dijadikan sebagai satu paket media demokrasi sekaligus proses penguatan demokratisasi, baik secara structural maupun sosial. Dalam konteks penguatan demokratisasi tersebut, Margaret Conway (2004) menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal menuju lajur demokrasi yang benar. Pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan atau *civic education*. Aktualisasi dari *civic education* sebenarnya terletak pada tingkat partisipasi politik rakyat di setiap momentum politik seperti pemilu. Seberapa jauh Pilkada selama ini memberi ruang partisipasi politik bagi rakyat? Apakah pilkada mampu menjadi titik persinggungan rakyat dan Negara sebagai manifestasi partisipasi politik rakyat? Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses.

Sistem politik Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari Orde Baru sampai Orde Reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis, dalam arti kebebasan untuk memilih dan tidak memilih yang berujung pada tingkat partisipasi masyarakat (semua lapisan).

Seiring dengan konstelasi politik di era reformasi penguatan demokrasi yang legitimate sebagai harapan dari akhir transisi demokrasi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan Pemilu sejak tahun 2004 hingga pemilu tahun 2014 secara langsung. Sebagai konsekuensi logis perubahan

atmosfer politik tersebut maka dinamika dan intensitas artikulasi politik pun makin tampak di tengah ranah kehidupan sosial politik. Setidaknya masyarakat diterpa wacana dan partisipasi politik tidak hanya lima tahun sekali saat Pemilu saja.

Tetapi juga, disemarakkan oleh Pemilu Kepala Daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dimana hamper di semua daerah kabupaten/kota se-Indonesia jumlah suara sah pemenang kalah dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.

Sebagai proses dari transformasi politik, masyarakat mengharapkan pula agar pemilu dapat menghasilkan pemimpin negara, wakil rakyat serta kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, legitimate, dan peka terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ini negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat rakyat daerah. Masyarakat daerah yang selama ini hanya sebagai penonton proses politik pemilihan yang dipilih oleh DPRD, kini masyarakat menjadi juga pelaku atau voter (pemilih) yang akan menentukan terpilihnya presiden, anggota legislatif maupun Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

Pemilu langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, masyarakat di sini meliputi juga mahasiswa sebagai masyarakat kampus sebagai golongan intelektual yang memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas (berpartisipasi) tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, *floating mass* (massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi (Amirudi, dkk: 2006). Dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan momentum yang cukup tepat untuk mengukir tingkat pendidikan politik masyarakat maupun kesadaran politik masyarakat dengan parameter tingkat partisipasi (penggunaan hak pilih) mahasiswa sebagai masyarakat kampus sebagai golongan pemilih pemula dan golongan intelektual sehingga hasil penelitian ini berupa Rekomendasi kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah agar dapat menyelenggarakan Pemilu dengan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi.

Aspek penting yang menjadi dasar penelitian ini adalah adanya korelasi obyek penelitian dengan beberapa mata kuliah yang ada di program studi PPKn sehingga hasil penelitian ini bias menjadi referensi buku ajar untuk matakuliah di prodi PPKn, untuk itu peneliti mengambil judul penelitian ini “Kajian Tingkat Partisipasi (Penggunaan Hak Pilih) Mahasiswa STKIP PGRI Nganjuk Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pilleg Dan Pilpres Tahun 2014) Sebagai Bahan Rekomendasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk”.

Tujuan penelitian yaitu (1) menyusun rekomendasi kepada penyelenggara pemilu yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Jawa Timur berdasarkan temuan temuan dan fakta-fakta dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden tahun 2014 yang lalu, (2) sebagai bahan referensi dan buku ajar pada beberapa mata kuliah di program studi PPKn diantaranya mata kuliah Sistem Politik Indonesia, Demokrasi Pancasila dan Pemilu.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dimana seorang peneliti berupaya menggali data secara spesifik terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang memiliki karakteristik atau keunikan tersendiri pada suatu obyek yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dimana hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (John: 2003). Tentunya dalam penelitian ini adalah karakteristik daripada kasus pemilihan umum, baik pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg) Tahun 2014 di Kabupaten Nganjuk.

Dalam penelitian ini, sumber data dan teknik pengumpulan data disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara langsung dan kuesioner survey terhadap mahasiswa STKIP PGRI Nganjuk sebagai alat bantu.

Dalam penelitian ini sebagai informan/mahasiswa daftar mahasiswa STKIP PGRI Nganjuk, yang dalam pemilu menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Penentuan informan/mahasiswa dengan purposive sampling dan snow ball. 2 teknik sampling ini memungkinkan bagi peneliti untuk lebih efektif dalam proses penggalian data dalam penelitian kualitatif. Dengan Purposive sampling, mahasiswa/informan dapat ditentukan dari awal, serta dengan snowball sampling akan memungkinkan untuk pengembangan informan/mahasiswa ketika dirasa data yang diperoleh melalui informan awal dipandang belum memadai. Dalam konteks itulah, maka sampel dengan bantuan kuesioner diambil dari masing masing kelas. Dari masing - masing kelas dipilih sampel yang memiliki angka tingkat kehadiran dan ketidakhadiran paling tinggi dimana masing-masing sampel setiap kelas terdiri dari 10 orang, sehingga secara keseluruhan mahasiswa/informannya dari 10 kelas tersebut berjumlah 100 orang.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri atau anggota tim peneliti. Namun setelah permasalahannya dan fokus penelitian jelas peneliti akan mengembangkan instrumen sederhana yang diharapkan dapat menjaring data pada sumber data yang lebih luas, dan mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan observasi.

Dalam penelitian ini, teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles and Huberman dan Spradley. Analisa dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian, sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisa data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, simpulan dan verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

### **1. Tingkat Kehadiran Dan Ketidakhadiran (Mahasiswa) *Voter Turn-Out* Dalam Dalam Pemilu Presiden Dan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Nganjuk**

Gambaran umum tingkat kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS (Voter Turn-Out) dalam pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Nganjuk di 10 kelas dengan survei yang dilakukan pada 10 orang tiap kelas dengan total 100 mahasiswa dilakukan secara acak melalui wawancara. Hal tersebut mengungkap bahwa tingkat kehadiran atau partisipasi politik mahasiswa pada even Pilpres maupun Pileg tahun 2014 yang lalu mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan even yang sama di tahun 2009.

Kenaikan tingkat kehadiran mahasiswa pada pemilu 2014 tersebut memang tidak terlepas dari semakin tingginya tingkat pendidikan yang rata-rata didominasi pada level lulusan SMA/MA/SMK-Diploma/Sarjana). Tingkat kehadiran para pemilih di TPS pada pemilihan presiden tahun 2014 pada mahasiswa STKIP PGRI Nganjuk disurvei secara keseluruhan tersebut tampak jauh lebih besar angka partisipasinya (kehadirannya) yaitu sebesar 96% (96 orang) dibandingkan dengan yang tidak berpartisipasi (tidak hadir) yang hanya sebesar 4% dari 100 mahasiswa yang tersurvei. Hal ini selaras dengan pandangan dan analisa Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karyanya Partisipasi Politik di Negara Berkembang yang menegaskan bahwa adanya kecenderungan naiknya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di suatu Negara berkembang akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakatnya. Semakin baik 2 komponen social masyarakat tersebut, maka ruang demokrasi masyarakat akan semakin berkembang serta mendorong kepada terwujudnya modernisasi suatu Negara (Modernizing state).

Analisa Huntington tersebut pun senada dengan pandangan pakar politik UGM, Affan Gaffar (2004) dalam bukunya Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi yang juga menegaskan bahwa naik-turunnya antusiasme masyarakat

terlebih pada masyarakat di Negara berkembang seperti Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat polarisasi kualitas pendidikan dan pekerjaan warganya. Dengan kualitas yang baik, maka kecenderungan munculnya faktor eksternal di luar diri warga masyarakat selaku pemegang suara akan lebih dapat dikontrol dengan baik, termasuk resistensi terhadap money politics yang terjadi. Walaupun hal itu terkadang tidak selamanya berjalan linier dengan hati nuraninya sendiri. Dengan kata lain, data hasil penelitian berbasis survei terhadap tingkat kehadiran mahasiswa sebagai pemilih pada Pilpres dan Pileg tahun 2014 di Kabupaten Nganjuk tersebut sesuai dengan paradigma teoritis akademis yang ada.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kehadiran Dan Ketidakhadiran Mahasiswa (Voter Turn-Out) Dalam Dalam Pemilu Presiden Dan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Nganjuk**

Robert Michel dalam karya politik monumentalnya *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendency of Modern Democracy* pernah menegaskan bahwa partisipasi politik (voter turn-out) mahasiswa modern dewasa ini tidak bisa dilepaskan oleh pengaruh adanya berbagai macam factor internal maupun eksternal yang ada pada diri seorang pemilih. Kedua faktor tersebut berjalan secara seiring dan saling menguatkan. Semakin kuat ikatan berbagai faktor tersebut akan semakin memungkinkan terjadinya pelonjakan jumlah kehadiran pemilih dalam sebuah pemilu. Hal itu pun selaras dengan apa yang juga terjadi di even Pilpres maupun Pileg tahun 2014 di Indonesia, termasuk di Kabupaten Nganjuk yang selama ini dikenal sebagai wilayah dengan tingkat homogenitas latar belakang masyarakatnya yang cukup tinggi dan beragam.

Dalam konteks itulah, secara umum berdasarkan deskripsi data sebelumnya yang menegaskan bahwa ada 3 faktor utama yang mempengaruhi tingkat kehadiran dan ketidakhadiran mahasiswa di TPS (Voter Turn-Out) dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif tahun 2014 yang lalu di Kabupaten Nganjuk. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1). Faktor Popularitas calon/kandidat, (2). Faktor sosial politik, dan (3). Faktor sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dengan banyaknya factor yang mempengaruhi

tingkat kehadiran pemilih di TPS tersebut semakin menunjukkan tingkat linieritas data tersebut dengan teori yang dikemukakan oleh Robert Michael tersebut.

Pada aspek faktor popularitas calon misalnya, berdasarkan hasil research yang memperlihatkan popularitas capres pada kelas SMT II PPKn dimana seluruh mahasiswa/informan dalam penelitian ini mengenal seluruh kandidat presiden-wakil presiden yang berkontestasi politik yaitu sebanyak 100% dari 20 mahasiswa yang ada atau 20% dari total 100 mahasiswa yang tersurvei di 10 kelas secara keseluruhan di STKIP PGRI Nganjuk.

Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa mahasiswa telah memperoleh akses informasi penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) dengan baik. Sedangkan pada mahasiswa SMT IV PPKn merupakan kelas yang paling rendah dibandingkan 4 kelas lain lainnya pada aspek popularitas pasangan capres yang berkontestasi yaitu sebesar 65 % (13 orang) dari 20 mahasiswa yang ada di dapil tersebut. Secara sosiologi politik, menurut analisa peneliti memang dapat dipahami bahwa semakin dikenal seorang kandidat oleh para pemilih, maka peluangnya untuk mendapatkan suara pemilih akan semakin besar.

Apalagi jika popularitas tersebut didukung oleh personalitas yang sangat baik dalam diri kandidat, maka peluangnya akan semakin besar, mengingat pemilih rasional akan lebih mempertimbangkan aspek sumbangsih/kontribusi yang akan dapat diberikan oleh kandidat tersebut kepada konstituennya manakala terpilih dalam pemilu tersebut.

Dalam konteks yang lebih spesifik, pengaruh popularitas tersebut dapat tersegmentasikan ke dalam bentuk golongan social kandidat sebagaimana yang tampak pada Pileg tahun 2014 di Kabupaten Nganjuk dimana segmen golongan politikus menjadi golongan yang paling ‘populer’ sebagai kandidat yang banyak digandrungi oleh para pemilih dimana dari 5 kelas yang ada di STKIP PGRI Nganjuk, yaitu di SMT I, III dan V yang merupakan wilayah dominasi kandidat legislatif dari kalangan politikus, sedangkan dari golongan segmen kyai/ustadz hampir di seluruh dapil yang ada selalu menempati posisi kedua yang menjadi ‘segmen favorit’ mahasiswa yang ada dari 100 mahasiswa yang tersurvei. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa eksistensi kyai/ustadz dalam Pileg selalu

menjadi ‘kuda hitam’ dalam percaturan pemilihan calon legislatif di tahun 2014 yang lalu.

Sedangkan dari faktor sosial ekonomi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang lalu misalnya juga terpetakkan ke dalam 3 unsur penting yaitu: (1). Dorongan politik oleh partai politik, keluarga, maupun personal pemilih, (2). Dorongan latar belakang pendidikan, (3). Dorongan latar belakang ekonomi/pekerjaan dimana pada aspek dorongan pekerjaan dan pendidikan ini jauh lebih menentukan karena dengan tingkat pendidikan dan kondisi perekonomian/pekerjaan para pemilih yang lebih memadai pada akhirnya akan mendorong mereka untuk memiliki kesadaran berpartisipasi politik yang jauh lebih baik. Misalnya saja, dari hasil research yang telah terdiskripsikan sebelumnya yang diketahui bahwa pada aspek dorongan politik, baik oleh partai politik, keluarga maupun personal pemilih sendiri ternyata lebih didominasi oleh aspek personal pemilih sendiri yang lebih condong memilih pilihannya sesuai dengan kehendaknya (hati nuraninya), baik pada saat Pilpres maupun Pileg tahun 2014 yang lalu, yaitu sebesar 85% (85 suara mahasiswa) dari 100 mahasiswa yang disurvei, baru disusul oleh dorongan keluarga sebesar 8% (8 suara mahasiswa) serta dorongan parpol sebesar 5% (5 suara mahasiswa). Hal ini menurut peneliti mengindikasikan bahwa pengaruh eksternal pemilih tidak terlalu signifikan termasuk munculnya ‘isu money politics’ yang selama ini ‘menggurita’ di hamper even pemilu yang ada di Indonesia. Kalau pun ada, pengaruhnya cukup kecil terhadap pilihan mahasiswa yang ada. Walaupun hal itu secara teoritis pula tidak menutup kemungkinan dapat pula terjadi sebagai implikasi tatanan demokrasi yang tengah berkembang.

## **Simpulan dan Rekomendasi**

### **Simpulan**

1. Tingkat Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (*Voter Turn-Out*) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden/Pilpres dan Pemilihan Legislatif/Pileg) Tahun 2014 di STKIP PGRI Nganjuk. *Pertama*, baik pada Pilpres maupun Pileg tahun 2014 di Kabupaten Nganjuk, dari 10 kelas yang ada

serta dari 100 mahasiswa survei kuesioner dan dikuatkan oleh 5 informan selaku kepala desa melalui survei wawancara yang ada menegaskan bahwa keduanya (Pilpres dan Pileg) sama-sama diikuti oleh 96% mahasiswa yang ada, dan hanya 4% mahasiswa yang tidak hadir (berpartisipasi) dalam Pilpres maupun Pileg tersebut. **Kedua**, yang membedakan diantara hasil survei Pilpres dan Pileg tersebut adalah sebaran mahasiswa yang tidak hadir/tidak mencoblos dimana pada Pilpres, mahasiswa yang tidak hadir (tidak mencoblos) terfokus pada 2 kelas saja, sedangkan pada Pileg tersebar pada 3 kelas.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (*Voter Turn-Out*) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pilpres dan Pileg) Tahun 2014 di STKIP PGRI Nganjuk. Faktor-faktor tersebut berdasarkan hasil *research* lapangan meliputi 3 faktor utama yang meliputi: **Pertama**, faktor popularitas calon/kandidat presiden dan calon legislatif. Misalnya, Pada aspek faktor popularitas capres misalnya, berdasarkan hasil *research* yang memperlihatkan popularitas capres di Dapil 3 dimana seluruh mahasiswa/informan dalam penelitian ini mengenal seluruh kandidat presiden-wakil presiden yang berkontestasi politik yaitu sebanyak 100% dari 20 mahasiswa yang ada atau 20% dari total 100 mahasiswa yang tersurvei di 5 kelas secara keseluruhan STKIP PGRI Nganjuk, sedangkan kelas SMT I merupakan kelas yang paling rendah dibandingkan 4 kelas lainnya pada aspek popularitas pasangan capres yang berkontestasi yaitu sebesar 65 % (13 orang) dari 20 mahasiswa yang ada di dapil tersebut atau 13% dari 100 Mahasiswa di 5 kelas yang ada. **Kedua**, faktor sosial politik. Secara umum, hasil *research* pada aspek faktor sosial politik pada pemilihan presiden (Pilpres) maupun pada pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2014 didominasi oleh 2 faktor utama yaitu: (1). Faktor internal pemilih yaitu pilihan partai politik secara personal, serta (2). Faktor eksternal pemilih yaitu ditentukan oleh tingkat intensifikasi sosialisasi pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, baik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). **Ketiga**, faktor sosial ekonomi. Dari hasil *research* yang telah dilakukan bahwa faktor dapat dipetakan ke dalam 3 unsur penting yaitu: (1). Dorongan politik oleh partai

politik, keluarga, maupun personal pemilih, (2). Dorongan latar belakang pendidikan, (3) Dorongan latar belakang ekonomi/pekerjaan dimana pada aspek dorongan pekerjaan dan pendidikan ini jauh lebih menentukan karena dengan tingkat pendidikan dan kondisi perekonomian/pekerjaan yang lebih baik pada akhirnya akan mendorong mereka untuk memiliki kesadaran berpartisipasi politik yang jauh lebih baik. Misalnya saja, pada aspek dorongan politik, baik oleh partai politik, keluarga maupun personal pemilih sendiri ternyata lebih didominasi oleh aspek personal pemilih sendiri yang lebih condong memilih sesuai dengan kehendaknya (hati nuraninya), baik pada saat Pilpres maupun Pileg tahun 2014 yang lalu, yaitu sebesar 85% (85 suara mahasiswa) dari 100 mahasiswa yang disurvei, baru disusul oleh dorongan keluarga sebesar 8% (8 suara mahasiswa) serta dorongan parpol sebesar 5% (5 suara mahasiswa). Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh eksternal pemilih tidak terlalu signifikan termasuk munculnya *'isu money politics'* yang selama ini terjadi. Kalau pun ada, pengaruhnya cukup kecil terhadap pilihan mahasiswa yang ada.

### **Rekomendasi**

1. Bagi STKIP PGRI Nganjuk.

Sebaiknya mendorong mahasiswa untuk turut berpartisipasi aktif dalam pemilu.

2. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sebaiknya pemerintah membuat kebijakan yang lebih populis terkait dengan upaya meningkatkan intensifikasi sosialisasi penyelenggaraan pemilu di masa-masa yang akan datang yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia baik pada aspek pendidikan politik masyarakat, media sosialisasi pemilihan umum, hingga mekanisme pemilihan umum, karena selama ini belum semua wilayah di Indonesia khususnya pedesaan dan pedalaman yang mampu mengakses informasi sekaligus program pendidikan politik bagi masyarakat, dengan begitu ke depan, kesadaran politik masyarakat (tingkat kehadiran untuk memilih yang terbaik/*best voter turn-out*) akan semakin baik dan berkualitas yang pada akhirnya juga akan mendorong terwujudnya kehidupan bernegara dan berbangsa yang lebih baik.

3. Bagi KPU, LSM dan Partai Politik. Sebagai mitra pemerintah, baik KPU, LSM dan partai politik untuk semakin meningkatkan mitra etosnya dalam memberikan program-program pendidikan dan pendampingan politik yang semakin berkualitas dan baik kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk secara *majority* (mayoritas) (walaupun selama ini sudah baik), mengingat selama ini masyarakat Nganjuk lebih senang ‘berideologi kepartaian’ daripada melihat figur kualitas kandidat/calon pilpres ataupun caleg yang ada. Dengan begitu ke depan, diharapkan akan muncul figur-figur pemimpin pilihan rakyat yang baik, berkualitas serta benar-benar mau menjadi ‘*server of people*’, bukan ‘*king of people*’ yang hanya mementingkan kepentingan dirinya maupun kelompoknya sendiri.
4. Bagi Masyarakat. Sebagai pemegang hak ‘veto’, suara rakyat adalah ‘suara tuhan’, oleh karenanya, masyarakat khusus masyarakat kabupaten Nganjuk hendaknya melihat pemilihan presiden, pemilihan legislatif ataupun pemilihan kepala daerah sebagai sebuah momentum berharga sekaligus sangat penting untuk meningkatkan kualitas harkat dan martabat kehidupan mereka, baik secara sosial, ekonomi, pendidikan, religiusitas, maupun politik dengan lebih mengedepankan sisi rasionalitas, obyektivitas, serta kualitas pilihannya, bukan semata-mata atas pertimbangan materi ataupun segmen ideologi kepartaian saja, agar ke depan pilihan mereka tersebut mampu melahirkan pemimpin yang jujur, amanah, berkualitas dan baik yang pada akhirnya akan dapat membantu secara maksimal berbagai kepentingan rakyatnya.

#### **Daftar Pustaka**

- Amirudin, dan Bisri A. Zaini.(2006). *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Conway, M. Margaret.(2004). *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Creswell, John. W.(2003). *Research Design Qualitative, Quantitative and MixedMethods Approaches*. London: Sage Publications.

- Gaffar, Affan.(2006). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan.(1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono.(2004). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara